

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 47 TAHUN 2015
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN
 MAGELANG TAHUN 2014 - 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2014-2019

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama yang Semakin Meningkat		
1.1	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator Usia Harapan Hidup adalah rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh penduduk dan merupakan ukuran keberhasilan di bidang pelayanan kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $eox = \frac{T(x)}{I(x)}$ dimana: eox = rata-rata umur (th. hidup) yang mungkin dicapai oleh suatu kohor penduduk hingga ulang tahun ke-1 T(x) = jumlah orang yang berhasil mencapai umur tepat 1 tahun I(x) = total tahun orang yang hidup setelah umur tepat 1 tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Dinas Kesehatan</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
1.2	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Gini	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau pemerataan distribusi pendapatan. Nilai koefisien gini (G) antara 0 dan 1 (0<1). Semakin kecil koefisiennya, pertanda semakin baik distribusi pendapatan nasionalnya.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi = Persentase Rumah Tangga atau Penduduk pada Kelas ke-i Qi = Persentase Kumulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran sampai kelas ke-i G < 0,3 = Ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang G > 0,5 = Ketimpangan tinggi</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA Sumber Data: BPS</p>
		<p>Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) merupakan ukuran keberhasilan di bidang pemerataan pendapatan antar wilayah kecamatan. Formulasi Pengukuran: $IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 \ln n}}{Y}$ dimana, untuk kabupaten/kota: <i>Y_i</i> = PDRB per kapita di kecamatan <i>i</i> <i>Y</i> = PDRB per kapita rata-rata kab/kota <i>F_i</i> = Jumlah penduduk di kecamatan <i>i</i> <i>n</i> = Jumlah penduduk di kab/kota Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA Sumber Data: BPS</p>
		<p>Persentase Penduduk miskin</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dan merupakan ukuran keberhasilan di bidang penanggulangan kemiskinan. Formulasi Pengukuran: $P = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^n$ dimana: <i>P</i> = Headcount Index atau persentase penduduk miskin <i>z</i> = Garis Kemiskinan <i>y_i</i> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (<i>i</i>=1, 2, 3, ..., <i>q</i>), <i>y_i</i> < <i>z</i> <i>q</i> = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan <i>n</i> = jumlah penduduk Tipe Perhitungan: Non Kumulatif SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA Sumber Data: BPS</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
1.3	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses terhadap Pendidikan	IPM	<p>Alasan Pemilihan Indikator: IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup (<i>Longevity</i>), pengetahuan (<i>Knowledge</i>) dan standar hidup layak (<i>Decent Living</i>).</p> <p>Formulasi Pengukuran: $IPM = \frac{IHH + (IMH+ILS) + IDB}{3}$</p> <p>dimana:</p> <p><i>IHH</i> = Indeks Harapan Hidup penduduk usia 1 tahun</p> <p><i>IMH + ILS</i> = Indeks Melek Huruf dan Lama Sekolah</p> <p><i>IDB</i> = Indeks Daya Beli Masyarakat setempat</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
2	Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berbasis pada Potensi Lokal Daerah		
2.1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja	Pertumbuhan PDRB	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pertumbuhan PDRB adalah pertambahan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha ekonomi di suatu wilayah, dan merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$</p> <p>dimana:</p> <p><i>t + 1</i> = tahun pengamatan PDRB</p> <p><i>T</i> = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
		PDRB per kapita	<p>Alasan Pemilihan Indikator: PDRB per Kapita adalah PDRB dibagi jumlah penduduk dan merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{PDRE}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$ <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
		Laju inflansi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Laju inflansi adalah indikator yang memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $[(1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2)(1 + \Delta Inf_t)]^{\frac{1}{t}} - 1$ <p>dimana:</p> <p>ΔInf = Perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya</p> <p>t = Periode pengamatan perubahan nilai inflasi</p> <p>Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>Inf_n = Nilai inflasi pada tahun n</p> <p>$Inf_{(n+1)}$ = Nilai pada 1 tahun berikutnya</p> <p>n = Tahun.....</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
		Rasio penduduk yang bekerja	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Rasio Penduduk yang Bekerja merupakan ukuran keberhasilan pembangunan khususnya pada strategi pro-job atau pengarus-utamaan penciptaan lapangan kerja</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}}$ <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Disnakersostrans</p> <p>Sumber Data: BPS</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengeluaran Konsumsi Pangan per Kapita	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pengeluaran Konsumsi Pangan per Kapita adalah memberikan informasi tentang pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keberhasilan pembangunan ekonomi.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Total Pengeluaran RT}}{\text{Jumlah RT}}$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
		Pengeluaran Konsumsi non Pangan per Kapita	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita adalah memberikan informasi tentang pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan non-pangan (barang tahan lama), dan merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan ekonomi.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Total Pengeluaran RT Non Pangan} \times 100}{\text{Total Pengeluaran}}$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
2.2	Menguatnya Kontribusi Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Nilai tukar petani	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai tukar petani adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase, dan digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pertanian.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$</p> <p>dimana: $NTP = \text{Nilai Tukar Petani}$ $I_t = \text{Indeks harga yang diterima petani}$ $I_b = \text{Indeks harga yang dibayar petani}$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BPS</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah		
3.1	Aksesabilitas antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktifitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.</p> <p>Formulasi Pengukuran: <i>Panjang Jalan</i> <i>Jumlah Kendaraan</i></p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: DPU dan ESDM</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
4.	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan		
4.1	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih merupakan ukuran keberhasilan pembangunan pada urusan perumahan. Air bersih (<i>clean water</i>) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum (<i>drinking water</i>) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam.</p> <p>Formulasi Pengukuran: <i>Jumlah RT menggunakan air bersih x 100</i> <i>Jumlah RT</i></p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: DPU dan ESDM</p> <p>Sumber Data: DPU dan ESDM</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	Luas Wilayah Industri	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Wilayah/kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang. Luas wilayah industri merupakan ukuran keberhasilan pembangunan pada peningkatan daya saing daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah Luas Wilayah Industri}}{\text{Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya}} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BAPPEDA</p> <p>Sumber Data: BAPPEDA</p>
5.	Meningkatnya Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis		
5.1	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil	Lama Proses Perijinan (Hari)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Lama Proses Perijinan merupakan indikator untuk mengukur transparansi dan kemudahan untuk investasi, serta daya saing daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: <i>Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)</i></p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: BMPPT</p> <p>Sumber Data: BMPPT</p>
5.2	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatkan Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Opini BPK 'WTP'	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Sedangkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor menyekini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: DPPKAD</p> <p>Sumber Data: DPPKAD</p>
		<p>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sistem AKIP adalah satu rangkaian siklus manajemen yang meliputi : perencanaan kinerja, perencanaan program/kegiatan, penyusunan anggaran, pelaksanaan Program/kegiatan, pengukuran dan pelaporan keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, dan pelaksanaan evaluasi internal. Penilaian AKIP bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya. <p>Formulasi Pengukuran: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Setda</p> <p>Sumber Data: Setda</p>
6.	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum		
6.1	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	Angka kriminalitas	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kriminalitas adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum, selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban. Tinggi rendahnya angka kriminalitas mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>kondusifitas daerah, khususnya di bidang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban.</p> <p>Formulasi Pengukuran: <i>Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun</i> $\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 10.000$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggungjawab: Satpol PP</p> <p>Sumber Data: Satpol PP</p>

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

IDAM LAKSANA, S H., M.Hum.

Pembina Tk I

NIP. 196812281994031006